

# KEKERASAN SIMBOLIK DI MEDIA MASSA

**Roekhan**

Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

**Abstract:** The research aims at reviewing the symbolic violence in mass media. The aspect of symbolic violence to be reviewed includes (a) the forms, (b) strategies, and (c) effects of symbolic violence to the reader. The research uses critical discourse analysis design developed by Fairclough. The result of data analyses found the realization of symbolic violence in the news text, in form of (a) blurred meaning, (b) bias logics, and (c) bias value. The blurred meaning, bias logics, and bias value as form of bias information in news text. The strategies of symbolic violence found in this research are (a) the softening of information, (b) information reasoning (logic), and (c) creating positive information. The effects of symbolic violence to the readers is seen in receptions of the information from the mass media includes (a) reception based on prejudice attitude and view and (b) reception based on neutral attitude. The symbolic violence does not impact to the readers reality in a short time respons.

**Key words:** symbolic violence, mass media, realization, strategy, effect

**Abstract:** Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kekerasan simbolik di media massa, yang meliputi (a) maujud kekerasan simbolik, (b) strategi kekerasan simbolik, dan (c) dampak kekerasan simbolik terhadap pembaca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan analisis wacana. Data penelitian ini berupa teks berita dan teks penerimaan. Teks berita dianalisis dengan analisis wacana kritis Fairclough dan teks penerimaan dianalisis dengan analisis resepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maujud kekerasan simbolik yang digunakan meliputi: (a) makna kabur, (b) logika bias, dan (c) nilai bias. Strategi kekerasan simbolik yang digunakan meliputi: (a) penghalusan informasi, (b) pelogisan informasi, dan (c) pemositifan informasi. Dampak kekerasan simbolik terhadap pembaca yang ditemukan menunjukkan: (a) penerimaan pembaca atas informasi dalam teks berita dipengaruhi oleh sikap berprasangka, dan (b) oleh sikap yang netral. Secara umum, kekerasan simbolik belum tampak secara nyata pengaruhnya pada penerimaan pembaca.

**Key words:** kekerasan simbolik, media massa, maujud kekerasan simbolik, strategi kekerasan simbolik, dampak kekerasan simbolik

Media adalah objek atau alat komunikasi yang seharusnya bersifat netral (Haryatmoko, 2007). Artinya, media massa menyajikan berita yang bersifat objektif dan faktual. Dalam praktiknya, suatu berita cenderung tidak objektif sejak awal (Makarim, 2002).

Berita cenderung tidak bebas dari kepentingan di luar pemberitaan. Akibatnya, isi berita belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Piliang, 2001). Sering kali yang disampaikan oleh media massa itu sebuah pendapat,

pandangan, praduga, bukan fakta. Karena disampaikan berulang-ulang dan dikemas secara halus, pembaca cenderung menerimanya sebagai informasi yang benar. Dalam kondisi ini, media massa telah melakukan *kekerasan simbolik* kepada khalayak (periksa Roekhan, 2007).

Kekerasan simbolik adalah makna, logika dan keyakinan yang mengandung bias tetapi secara halus dan samar dipaksakan kepada pihak lain sebagai sesuatu yang benar (Bourdieu, 1994; Fashri, 2007). Kekerasan simbolik didasarkan pada rasa percaya, loyalitas, kesediaan untuk menerima, hutang budi, dan lain-lain (Thomson, 2007:96).

Kekerasan simbolik didasarkan pada harapan dan kepercayaan publik yang sudah terbentuk dan tertanam lama secara sosial (Bourdieu, 1994). Pemaksaan tersebut dilakukan secara halus dan samar sehingga publik tidak menyadari dan merasakannya sebagai paksaan (periksa pula Rusdiarti, 2003; Fashri, 2007). Dengan menyembunyikan kekerasannya, diharapkan kekerasan simbolik tersebut bisa diterima oleh khalayak sebagai sesuatu yang wajar, sebagai wacana yang dominan atau *doxa* (Bourdieu, 1994; Rusdiarti, 2003; Fashri, 2007; Piliang, 2001; dan Foucault, 1971). Kekerasan simbolik merupakan *praktik dominasi* melalui komunikasi (periksa Thomson, 1984; Foucault, 1971). Wacana yang kalah dipinggirkan dan tidak diakui oleh publik. Hal itu dapat dilihat pada pemberitaan kasus semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo.

Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terjadi sejak 27 Mei 2006 (Wikipedia, 2009). Volume semburan mencapai lebih dari 100.000 m<sup>3</sup> setiap hari. Semburan lumpur itu berlangsung sampai saat ini dan merendam kawasan permukiman, pertanian, perindustrian di sebelas kecamatan di sekitarnya, merusak jalan ruas tol Gempol-Porong, serta mengganggu aktivitas perekonomian di

Jawa Timur. Peristiwa semburan lumpur Porong menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media massa. Selama tahun 2006—2007, hampir setiap hari muncul pemberitaan tentang peristiwa tersebut, baik di televisi maupun di koran.

Sebagai wacana, teks berita yang mungkin mengandung bias menarik untuk dibedah dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis berpandangan bahwa penyampaian informasi dalam teks media massa mengandung bias kepentingan (ideologi), baik kepentingan bisnis, politik, maupun kepentingan lain (Eriyanto, 2006). Kecenderungan ketidaknetralan pemberitaan di media massa itu disebabkan oleh frame yang digunakan oleh wartawan dan media.

Tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan (a) maujud kekerasan simbolik dalam teks berita; (b) strategi kekerasan simbolik dalam teks berita; dan (c) dampak kekerasan simbolik dalam teks berita terhadap pembaca.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Pemilihan dan penggunaan metode kualitatif didasari pertimbangan berikut. Pertama, data penelitian ini bersifat alamiah, yakni teks berita. Teks berita merupakan wacana atau praktik berbahasa di media massa. Kedua, sebagai maujud praktik berwacana, teks berita dipandang sebagai praktik pemaknaan (Bourdieu, 1994). Praktik pemaknaan ini merupakan kekerasan simbolik yang akan dianalisis, ditafsirkan dan dimaknai berdasarkan konteks sosiobudaya media massa (Eriyanto, 2006).

Rancangan analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fairclough. Data penelitian ini berupa teks berita di koran dan teks penerimaan pembaca atas pemberitaan kasus semburan lumpur

di koran. Teks berita dikumpulkan dari *Jawa Pos*, *Kompas*, *Suara Pembaharuan*, dan *Republika*. Data penerimaan pembaca dikumpulkan dari koran dan dunia maya yang ditulis oleh pembaca ideal (terdidik). Teks berita dianalisis dengan *analisis wacana kritis* dan *analisis framing*. Teks tanggapan pembaca dianalisis dengan *analisis resepsi*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sesuai dengan rumusan masalah, hasil penelitian ini diklasifikasi menjadi tiga, yaitu (a) maujud kekerasan simbolik, (b) strategi kekerasan simbolik, dan (c) dampak kekerasan simbolik.

### Maujud Kekerasan Simbolik

Hasil analisis data menemukan bahwa kekerasan simbolik dalam teks berita bermaksud: (a) makna kabur, (b) logika bias, dan (c) nilai bias.

### Makna Kabur

Makna kabur adalah makna yang samar, sehingga tidak bisa dipahami dengan jelas. Dalam penelitian ini, makna kabur yang ditemukan bermaksud makna bias, makna yang terlalu umum atau terlalu khusus, dan makna implisit sebagaimana tampak pada data berikut.

(1) Sudah lama pertanyaan publik belum terjawab, seperti mengapa terjadi semburan lumpur, apakah akibat *human error* atau sebab-sebab lain. Lalu, mengapa *korban ditelantarkan*, mengapa Lapindo *dibiarkan bebas*? " ucapnya (SP03-A1cb).

(2) Penggagas interpelasi Lapindo lainnya, Ade Daud Nasution dari Fraksi Partai Bintang Reformasi mengingatkan, PDI-P adalah partai oposisi yang menyebut diri sebagai *partai wong cilik* (SP08-A1ac).

(3) "Semua dana relokasi akibat banjir bencana *lumpur lapindo* ditanggung APBN", kata Sri Mulyani (JP08-A1ca).

Pada data (1), pertanyaan *mengapa korban ditelantarkan* dan *mengapa Lapindo dibiarkan bebas* mengandung makna bias politik. Dikatakan mengandung *makna bias politik* karena pertanyaan itu mengandung stigma politik terhadap pemerintah. Sejak terjadinya semburan lumpur, PT Lapindo dan pemerintah sudah menangani korban semburan dalam bentuk: memberi uang makan, mendirikan dapur umum, tempat penampungan, layanan kesehatan, uang sewa rumah dan lain-lain. Pertanyaan itu mengandung tuduhan bahwa pemerintah melindungi PT Lapindo yang dinilai bersalah, walaupun belum ada hasil penyelidikan yang menetapkan PT Lapindo bersalah. Wacana *pemerintah menelantarkan korban* dan *membiarkan PT Lapindo Brantas yang dinilai bersalah tetap bebas* menjadi dominan dan mendominasi wacana *pemerintah telah berusaha menangani korban semburan lumpur panas* dan *sudah berusaha menyelediki penyebab terjadinya semburan lumpur* untuk menetapkan apakah PT Lapindo bersalah atau tidak.

Pada data (2), ungkapan *partai wong cilik* mengandung *bias penilaian bipolar*. Sebab, pernyataan tersebut mengandung pemilahan partai politik menjadi dua kelompok, yaitu *partai wong gedhe* yang membela kepentingan penguasa dan *partai wong cilik* yang membela kepentingan rakyat. Semula, PDI-P merupakan salah satu partai yang mendukung usulan interpelasi Lapindo. Akan tetapi dalam perjalanannya, PDI-P menarik dukungannya sehingga PDI-P dinilai bukan lagi menjadi *partai wong cilik* tetapi *partai wong gedhe*.

Pada data (3), digunakan ungkapan *lumpur lapindo*. Ungkapan tersebut mengandung pengertian 'lumpur milik Lapindo', 'lumpur dari Lapindo', 'lumpur buatan Lapindo' atau 'lumpur yang disebabkan oleh Lapindo'. Makna tekstual

'lumpur yang disebabkan oleh PT Lapindo' untuk ungkapan *lumpur lapindo* memiliki **makna implikatur** 'PT Lapindo Brantas melakukan kesalahan atau kelalaian dalam proses pengeboran sehingga menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas'. Dengan demikian, PT Lapindo menjadi pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua dampak yang ditimbulkannya, walaupun belum ada keputusan tentang penyebab terjadinya semburan lumpur.

### **Logika Bias**

Istilah *logika bias* berarti 'logika yang dibelokkan' untuk melogiskan pernyataan yang tidak logis. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa *logika bias* yang digunakan dalam teks berita dapat diklasifikasi sebagai berikut: logika bias dengan memberdayakan generalisasi berlebihan, memberdayakan bukti yang lemah, dan memberdayakan premis yang lemah sebagaimana tampak pada data di bawah ini.

(4) Win Hendrarso: *Kontribusi Lapindo Nol!* (KP08-A2a).

Data (4) merupakan pernyataan bupati Sidoarjo tentang kontribusi PT Lapindo Brantas kepada pemerintah daerah Sidoarjo. Data (4) di atas merupakan judul teks berita yang dimuat di *Kompas* pada hari Sabtu, 24 Maret 2007. Dalam pernyataannya, bupati mengatakan sebagai berikut:

Bukankah Lapindo banyak melakukan kegiatan eksploitasi di Sidoarjo? (pertanyaan wartawan)

Betul. Lapindo memiliki sekitar 20 sumur gas di Sidoarjo, tetapi kontribusinya ke daerah nol. Terus terang tidak ada sama sekali. Nol. Nol besar. Silakan tulis itu!

Berkaitan dengan pernyataan bupati tersebut, penulis menyertakan informasi lain yang bersumber dari DPRD Sidoarjo sebagai berikut:

Kontribusi Lapindo Brantas Inc untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sidoarjo tahun 2004 sebesar Rp1,1 miliar dan tahun 2005 sebesar Rp45 juta. Adapun tahun 2006, Rp0.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa PT Lapindo memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Sidoarjo pada 2004 dan 2005. Data(4) dikatakan mengandung generalisasi berlebihan karena hanya pada tahun 2006 PT Lapindo tidak memberikan bagi hasil kepada pemda Sidoarjo. Dengan digunakannya sebagai judul teks berita, kesimpulan bupati menjadi wacana dominan.

### **Nilai Bias**

*Nilai (value)* adalah (a) hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, (b) sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Berdasarkan pengertian di atas, *nilai bias* berarti 'nilai yang dibiarkan atau dibelokkan' untuk mendukung kepentingan penulis yang akan dipaksakan kepada pembaca. Nilai bias yang ditemukan dalam penelitian ini berupa: nilai moral, nilai ilmiah, dan nilai hukum sebagaimana tampak pada data berikut.

(5) Dalam pembahasan tersebut, Lapindo juga harus memberikan jawaban mengenai tuntutan dari sejumlah perusahaan terkait masalah THR. ***Ini persoalan ribuan buruh yang menggantungkan hidup di bawah perusahaan korban lumpur*** (KP11-A3).

(6) Bagi Aria Bima dkk, ***pengunduran waktu ini menunjukkan bukti, masalah ini begitu seriusnya, sehingga para pengusul harus berbenturan dengan kepentingan tertentu***(RP06-A3).

Pada data (5), pernyataan **Ini persoalan ribuan buruh yang menggantungkan hidup di bawah perusahaan korban lumpur** mengandung **nilai moral** yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab kemanusiaan. Pernyataan

nilai moral tersebut mengandung logika moral bahwa ribuan buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi korban semburan lumpur menggantungkan hidup mereka pada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena semburan lumpur itu disebabkan oleh kesalahan PT Lapindo, maka pembayaran THR para buruh itu menjadi tanggung jawab PT Lapindo. Kalau PT Lapindo menolak tanggung jawab itu, berarti PT Lapindo tidak memiliki rasa kemanusiaan atau tanggung jawab kemanusiaan. Pernyataan nilai luhur tersebut dibelokkan menjadi stigma bagi PT Lapindo.

Data (6) merupakan pernyataan Aria Bima, dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Pernyataan Aria tersebut berkaitan dengan tertundanya pengusulan interpelasi Lapindo yang didukung oleh FPDIP. Sebab, ada sejumlah pengusul yang menarik dukungan mereka setelah terjadi lobi politik oleh fraksi yang menolak pengusulan interpelasi Lapindo. Hal itu menunjukkan bahwa usulan interpelasi Lapindo sarat kepentingan politik. Oleh sebab itu, alasan penundaan waktu pengusulan sebagai bukti ilmiah mengandung *bias ilmiah* karena digunakan untuk membungkus kepentingan politik.

### Strategi Kekerasan Simbolik

Strategi kekerasan simbolik yang ditemukan penelitian ini meliputi: (a) penghalusan informasi, (b) pelogisan informasi, dan (c) pemositifan informasi.

### Penghalusan Informasi

Penggunaan strategi penghalusan makna dalam teks berita menyebabkan informasi yang disampaikan tidak jelas dan bertafsir. Hasil analisis data menemukan bahwa strategi penghalusan informasi yang digunakan dalam teks berita di surat kabar meliputi: penghalusan informasi dengan pelabelan positif dan negatif dan penghalusan informasi dengan pengisian.

(7) Korban yang *ditelantarkan* pemerintah merasa hanya *dijadikan alat bagi kepentingan kelompok tertentu* yang justru tidak memperjuangkan nasib mereka (KP17-B1aa).

(8) Hampir setiap hari dia *harus melayani* keluhan, pengaduan, dan unjuk rasa warga, terutama yang rumahnya terendam lumpur panas (KP08-B1ba)

Pada data (7), warga korban dilabeli dengan “pihak yang *ditelantarkan* dan *dijadikan alat bagi kepentingan kelompok tertentu*”. Label itu bersifat positif bagi warga korban. Label itu berarti warga korban adalah orang-orang yang sengaja dikorbankan dan dijadikan alat bagi kepentingan tertentu, baik oleh pemerintah, PT Lapindo maupun pihak lain. Label itu menggugah timbulnya rasa simpati berbagai pihak, termasuk para pembaca.

Data (8) adalah pernyataan bupati Sidoarjo yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terendam lumpur panas, yang tidak kunjung terealisasi. Penggunaan kata *melayani* mengandung pengertian ‘bupati menjadi pelayan warga’. Itu berarti bupati mendukung warga secara terhormat (orang yang dilayani) dan memperlakukannya secara baik. Makna ini mengandung konotasi ‘meninggikan’ bupati sebagai seorang pemimpin yang baik dan penuh pengabdian.

### Pelogisan Informasi

*Pelogisan informasi* adalah menciptakan hubungan logis antarpernyataan dalam teks berita yang sebenarnya tidak memiliki hubungan logis agar informasi itu dapat diterima oleh akal sehat pembaca. Pelogisan informasi dalam teks berita yang ditemukan, antara lain: penciptaan hubungan sebab akibat (*penyebabakibat*), penciptaan hubungan analogis (*penganalogian*), penciptaan hubungan penegasan (*penegasan*), dan penciptaan hubungan

pertentangan (*pemertentangan*) sebagaimana disajikan di bawah ini.

(9) Mengenai **penjualan seluruh saham Lapindo** kepada Freehold Group Limited baru-baru ini. Wapres mengatakan bahwa **itu urusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "Karena penjualan itu legal, itu urusan Bapepam (KP03- B2a).**

Data (9) merupakan laporan hasil wawancara penulis dengan Wakil Presiden, Yusuf Kalla. Pada data (9) tersebut terdapat dua pernyataan yang tidak memiliki hubungan sebab akibat, tetapi diciptakan hubungan sebab akibat antara keduanya. Penciptaan hubungan sebab akibat kedua pernyataan itu memunculkan implikatur yang membuat hubungan itu tampak logis dan benar seperti tampak pada data di bawah ini.

Penjualan seluruh saham Lapindo kepada Freehold Group itu (diperkenankan pemerintah dan menjadi) urusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (karena **tanggung jawab menangani semburan lumpur melekat pada PT Lapindo bukan pemilik PT Lapindo**).

*sebab*

Penjualan itu legal (sehingga keberadaan PT Lapindo tetap dapat dipantau dan dimintai pertanggungjawaban).

Hubungan logis yang diciptakan itu menjadi dominan dan mendominasi *hubungan tidak logis* kedua kalimat jawaban Jusuf Kalla. Hubungan tidak logis tersebut adalah (a) PT Lapindo adalah sarana atau wadah bagi pengusaha, (b) ketika terjadi kecelakaan dalam penggunaannya yang bertanggung jawab adalah pemakai atau pemiliknya.

### ***Pemositifan Informasi***

*Pemositifan informasi* berarti membuat informasi negatif atau kurang positif menjadi positif (tegas, meyakinkan, dan bisa

diterima oleh pembaca). Pemositifan informasi yang ditemukan penelitian ini meliputi: peluhuran informasi, pemformalan informasi, dan pemertabatan informasi sebagaimana ditunjukkan oleh data di bawah ini.

(10) Meski terlambat, dia tetap menyampaikan **komitmennya** untuk memperjuangkan nasib korban lumpur Lapindo di Sidoarjo (JP05-B3aa).

(11) Yang jelas, yang bertanggung jawab kepada negara adalah Lapindonya, meskipun pemiliknya (berganti-ganti). Apalagi sudah ada **Keputusan Presiden** yang menetapkan kerugian itu (KP03-B3ba)

Data (10) merupakan pernyataan Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR. Pernyataan itu merupakan tanggapan Muhaimin atas keterlambatan dia memberikan dukungan terhadap pengusulan interpelasi Lapindo. Pada data (10) Muhaimin menyatakan **komitmennya untuk memperjuangkan nasib korban** semburan lumpur dengan caramendukung pengusulan interpelasi Lapindo. Penggunaan nilai komitmen pada data (10) merupakan *nilai biaskarena* nilai komitmen yang bersifat luhur itu digunakan untuk kepentingan politis. Akan tetapi, nilai komitmen yang bias itu menjadi samar bahkan tampak bernilai karena dirujuk pada *upaya memperjuangkan nasib korban*.

Data (11) merupakan pernyataan Wakil Presiden. Pernyataan itu merupakan jawaban Wakil Presiden atas pertanyaan wartawan tentang rencana penjualan saham PT Lapindo kepada perusahaan asing. Penjualan saham PT Lapindo tersebut dapat memberikan peluang kepada PT Lapindo untuk lari dari tanggung jawab dalam menangani semburan lumpur dan dampaknya. Dengan demikian, pemberian izin penjualan saham itu bisa dinilai sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada PT Lapindo untuk menghindari tanggung jawab

memberikan ganti rugi kepada warga korban. Bias kepentingan pada pernyataan Yusuf Kalla itu menjadi samar bahkan tampak bernilai karena dirujuk pada *nilai hukum (keppres)*.

### Dampak Kekerasan Simbolik

Dampak kekerasan simbolik adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh kekerasan simbolik pada pembaca (pandangan dan sikap). Pandangan dan sikap pembaca terhadap informasi dalam teks berita yang ditemukan penelitian ini tampak pada penerimaan pembaca atas informasi tersebut, yang meliputi: (a) penerimaan yang dilandasi oleh sikap berprasangka dan (b) penerimaan yang dilandasi oleh sikap netral.

#### *Penerimaan yang Dilandasi Sikap Berprasangka*

*Prasangka* adalah evaluasi oleh seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain yang semata-mata didasarkan pada orang atau kelompok itu bukan anggota kelompoknya. Prasangka bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Prasangka terbentuk secara sosial dalam waktu yang lama. Pembaca yang memiliki prasangka, penerimaannya atas informasi yang dibaca di media massa dipengaruhi oleh prasangkanya sebagaimana tampak pada data berikut.

(12) Nama “lumpur lapindo” perlahan mulai sengaja dihilangkan, “haram” disebut.

Pers dipengaruhi agar tidak memakai istilah itu dengan cara sistematis dan terencana, bahkan dibentuk humas khusus untuk membina opini publik. Menurut Humas khusus ngurusin lumpur lumpuran ini, jangan sebut bencana ini sebagai: “lumpur lapindo”, tapi sekarang berganti nama menjadi “lumpur sidoarjo” (Sunudyantoro-pembaca dan pengamat media 06-03-2007) (DM01-C1a).

Data (12) merupakan gambaran penerimaan informasi yang dilandasi prasangka karena pandangan stereotipe terhadap PT Lapindo. Sebab, pembaca mengklasifikasi pengusaha menjadi dua kelompok, yaitu (a) pengusaha yang jujur, terbuka, dan peduli kepada masyarakat sekitar, dan (b) pengusaha yang biasa berbohong, bersikap tertutup, dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar. PT Lapindo dimasukkan ke dalam kelompok pengusaha jenis kedua. Berdasarkan klasifikasi yang bersifat negatif terhadap PT Lapindo tersebut, lahir-lah penerimaan informasi tentang kasus semburan lumpur yang bias pandangan stereotipe. Sebab, tidak semua ciri yang ditetapkan pembaca bisa dikenakan kepada PT Lapindo.

#### *Penerimaan yang Dilandasi Sikap Netral*

Pembaca yang bersikap netral membaca dan menerima informasi tentang semburan lumpur secara kritis sebagaimana tampak pada data berikut.

(13) Kalau mau bicara “jujur” pun, kita harus jujur bahwa artikel inipun “tidak hanya” memuat bahwa memang ada *fenomena gunung lumpur* di Jawa. Karena artikel inipun memuat bahwa dalam melakukan pekerjaan subsurface harus *ada aspek “hazards”nya* dari bermacam data termasuk salah satu input *hazardnya* adalah ilmu geologi dan apakah hal ini dilakukan? (B8a-Guruh Didi-peserta diskusi block Mudji 2008)

Data (13) merupakan pernyataan yang mengandung sikap netral pembaca terhadap pemberitaan kasus semburan lumpur yang didasari oleh pandangan ilmiah yang benar. Pembaca menerima pandangan bahwa Jawa merupakan wilayah yang banyak mengandung tambang gas dan minyak bumi. Sumber minyak dan gas tersebut sering berdampingan dengan gunung lumpur yang berbahaya. Itulah sebabnya, setiap kegiatan pengeboran minyak dan gas selalu beresiko menyebabkan semburan lumpur. Pandangan

ini membuat pembaca tidak memilih salah satu pandangan selama belum ada hasil penelitian yang akurat.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, di bawah ini disajikan pembahasan hasil penelitian, yang meliputi: (a) maujud kekerasan simbolik, (b) strategi kekerasan simbolik, dan (c) dampak kekerasan simbolik.

### *Maujud Kekerasan Simbolik*

Berdasarkan prinsip jurnalisme, informasi yang harus disampaikan oleh teks berita adalah informasi yang objektif, benar, lugas, dan jelas (Kovach dan Rosenstiel, 2001; Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2007). Akan tetapi, dalam praktiknya informasi yang disampaikan tidak selalu objektif, benar, lugas, dan jelas (Mulyana, 2005; Murdock dan Golding, tanpa tahun). Hasil analisis data penelitian menemukan informasi yang bias yang berupa (a) makna kabur, (b) logika bias, dan (c) nilai bias yang dikategorikan sebagai maujud (*entity*) kekerasan simbolik.

### *Makna Kabur*

Makna kabur adalah makna yang samar, sehingga tidak bisa dipahami dengan jelas. Dalam penelitian ini, makna kabur yang ditemukan bermaujud makna bias, makna yang terlalu umum atau terlalu khusus, dan makna implisit. Penyampaian informasi dalam maujud makna yang kabur, menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi samar dan halus (periksa Bourdieu, 1994; Fashri, 2007; dan Rusdiarti, 2003).

Idealnya, sebuah teks berita menyajikan informasi yang benar dan objektif. Informasi yang benar dan objektif dapat dipercaya dan diterima oleh pembaca. Akan tetapi, informasi yang demikian tidak bisa menutupi kepentingan tersembunyi dari penulis berita dan perusahaan media

(bandingkan dengan Rani, 2006 dan Wahyuni, 2008). Informasi bias yang berwujud informasi kabur tersebut pada hakikatnya merupakan informasi yang dilandasi oleh kepentingan tersembunyi (ideologi) penulis berita, pengelola dan pemilik media demi keuntungan media, seperti kepentingan ekonomi, kekuasaan, pencitraan positif, dan lain-lain (periksa Eriyanto, 2006; Sudiby, 2006; Severin dan Tankard, 2001; dan Scannell, 2001).

### *Logika Bias*

Istilah *logika bias* berarti ‘logika yang dibelokkan’ untuk melogiskan pernyataan yang tidak logis. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa *logika bias* yang digunakan dalam teks berita dapat diklasifikasi sebagai berikut: logika bias dengan memberdayakan generalisasi berlebihan, memberdayakan bukti yang lemah, dan memberdayakan premis yang lemah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Penggunaan generalisasi berlebihan, bukti lemah dan premis lemah yang ditemukan penelitian ini dapat menghasilkan logika implikatur yang dikehendaki oleh penulis. Implikatur ini dapat memperkuat penyampaian maksud penulis kepada pembaca teks berita (periksa Cummings, 2005; Roekhan, 2007). Dengan implikatur itu, wacana yang menggunakan logika bias menjadi kuat dan dominan. Wacana tersebut dapat mendominasi wacana yang menentanginya (*counter discourse*) (periksa Foucault, 1971). Dengan demikian, informasi yang mengandung logika bias tampak samar dan halus sehingga tidak dikenali oleh pembaca (periksa Bourdieu, 1994 dan Fasri, 2007).

### *Nilai Bias*

*Nilai (value)* adalah (a) hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, (b) sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Berda-



sarkan pengertian istilah *nilai* di atas, istilah *nilai bias* berarti ‘nilai yang dibiaskan atau dibelokkan’ untuk mendukung maksud atau kepentingan penulis yang akan dipaksakan kepada pembaca. Nilai bias yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu (a) nilai moral, (b) nilai ilmiah, dan (3) nilai hukum. *Nilai moral* adalah nilai yang berkaitan dengan masalah baik dan buruk bagi kehidupan manusia. *Nilai ilmiah* adalah nilai yang berkaitan dengan kebenaran ilmu. Nilai ilmiah bias yang ditemukan penelitian ini terdapat pada satu data. *Nilai hukum* adalah nilai yang berkaitan dengan kebenaran hukum. Nilai hukum bias ialah nilai yang berkaitan dengan kebenaran hukum yang diterapkan pada konteks yang tidak atau kurang tepat secara hukum.

Informasi yang mengandung nilai negatif merupakan informasi yang salah dan tidak baik. Informasi yang demikian, tidak bisa dipercaya dan cenderung ditolak oleh pembaca. Akan tetapi, dalam teks berita yang mengandung nilai negatif tersebut digunakan untuk menutupi maksud tersebut pihak penulis, pengelola dan pemilik media, maka nilai negatif atau kurang positif tersebut diubah menjadi nilai positif yang dibiaskan. Dengan demikian, nilai yang negatif atau kurang positif tersebut menjadi samar dan halus sehingga tidak dikenali oleh pembaca dan dapat diterima oleh pembaca sebagai informasi yang benar dan dapat dipercaya (periksa Roekhan, 2007; Sudiby, 2006; dan Eriyanto, 2005).

### Strategi Kekerasan Simbolik

*Menarik* dan *enak dibaca* adalah dua ciri utama kemasan berita di media masa, termasuk koran (Kovach dan Rosenstiel, 2006:192—193). Penyajian teks berita secara menarik dan *enak dibaca* itu menguntungkan tetapi juga merugikan pembaca. Menguntungkan karena penyajian

yang menarik dan *enak dibaca* membuat pembaca merasa nyaman ketika membacanya. Dikatakan merugikan pembaca karena sajian yang menarik dan *enak dibaca* sering digunakan penulis untuk menutupi informasi yang bias dan subjektif yang dikategorikan sebagai *strategi kekerasan simbolik* (periksa Eriyanto, 2006; Severin dan Tankard, 2001; dan Scannell, 2001). Strategi kekerasan simbolik yang ditemukan penelitian ini diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu (a) penghalusan informasi, (b) pelogisan informasi, dan (c) pemosisifan informasi.

### Penghalusan Informasi

Penggunaan strategi penghalusan makna dalam teks berita menyebabkan informasi yang disampaikan tidak jelas dan bertafsir. Hasil analisis data menemukan bahwa strategi penghalusan informasi yang digunakan dalam teks berita di surat kabar meliputi: penghalusan informasi dengan pelabelan positif dan negatif dan penghalusan informasi dengan pengisian.

*Label* berarti (a) tempelan yang menjelaskan tentang identitas pemilik, (b) merek, dan (c) petunjuk singkat tentang zat yang dikandung di dalamnya (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007:621). Berdasarkan arti kata *label* tersebut istilah *pelabelan* berarti ‘pemberian label’. Pelabelan kepada seseorang atau pihak tertentu berarti ‘memberikan keterangan tentang identitas, merek, atau petunjuk tentang orang atau pihak yang dilabeli’ agar dikenali oleh khalayak. Penggunaan pelabelan positif dan pelabelan negatif dimaksudkan untuk menghaluskan informasi dalam teks berita.

Pemberian label positif terhadap seseorang atau sesuatu dapat mengugah timbulnya rasa simpati atau kesan positif pembaca terhadap orang atau sesuatu yang dilabeli positif. Pelabelan membuat pembaca tidak bisa melihat seseorang atau sesuatu

sebagaimana adanya. Keadaan seseorang atau pihak yang diberitakan ditutupi oleh label yang ditempelkan kepada orang atau pihak tersebut. Karena label itulah yang selalu dihadapi pembaca, maka yang dipersepsi oleh pembaca tentang orang atau pihak tersebut adalah sesuai label yang ditempelkan kepadanya (periksa Severin dan Tankard, 2001; Sudibyo, 2005 dan Dhakidae, 1996).

Penggunaan label positif dapat menggu-gah timbulnya kesan positif bahkan rasa simpati pembaca kepada orang atau pihak yang dilabeli. Sebaliknya, pemberian label negatif dapat mnggundang timbulnya kesan negatif bahkan rasa benci pembaca kepada pihak atau orang yang dilabeli. Dengan memberikan label negatif, pemahaman pembaca terhadap informasi yang disampaikan dalam teks berita dihalangi oleh label negatif yang diberikan oleh penulis sehingg penerimaan pembaca atas informasi tersebut sesuai dengan label negatif yang diberikan oleh penulis (**periksa Roekhan, 1992; Pratt, 1977 dan 1981**).

Penggunaan kiasan juga membuat informasi bias yang disampaikan menjadi samar dan halus karena dibungkus dengan bahasa yang bermakna kias atau implikatur. Melalui penggunaan bahasa bermakna kias, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis diubah menjadi makna yang halus dan samar (periksa Roekhan, 1992; Pratt, 1977 dan 1981).

### ***Pemositifan Informasi***

*Pemositifan informasi* berarti membuat informasi yang negatif atau kurang positif menjadi tegas, meyakinkan, dan bisa diterima oleh pembaca atau membuat informasi yang negatif atau kurang positif tersebut menjadi tampak positif. Pemositifan informasi yang ditemukan penelitian ini dilakukan dengan cara: peluhuran infor-

masi, pemformalan informasi, dan pemat-tabatan informasi.

Ketiga strategi tersebut digunakan agar: (a) informasi bias yang disampaikan tampak halus dan samar sehingga tidak dikenali oleh pembaca; (b) informasi yang mengan-dung logika salah tersebut tampak logis dan bernalar sehingga dapat diterima oleh penalaran pembaca; dan (c) informasi yang nilai tidak atau kurang positif tersebut tampak positif dan bermartabat. Dengan demikian, pembaca lebih mudah menerimanya karena dianggap sebagai informasi yang benar, logis dan bernilai positif (periksa Roekhan, 2007; Rani, 2006; Fasri, 2007; Bourdieu, 1994; dan Rusdiarti, 2003).

### **Dampak Kekerasan Simbolik**

Dampak kekerasan simbolik adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh kekerasan simbolik pada pembaca. Sasaran kekerasan simbolik adalah pikiran pembaca yang tampak pada pandangan dan sikap pembaca terhadap informasi yang disampaikan oleh media massa. Pandangan dan sikap pembaca terhadap informasi yang disampaikan oleh media massa tampak pada penerimaan pembaca atas informasi tersebut. Penerimaan pembaca atas informasi yang disampaikan media massa salah satunya direalisasikan dalam bentuk teks penerimaan. Penerimaan pembaca atas informasi bias yang disampaikan media massa yang ditemukan penelitian ini diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu (a) penerimaan yang dilandasi oleh sikap berprasangka dan (b) penerimaan yang dilandasi oleh sikap netral.

### ***Penerimaan yang Dilandasi Sikap Berprasangka***

Nelson (Sarwono, 2007:18) memberikan pengertian *prasangka* sebagai suatu evaluasi oleh seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain yang semata-mata didasarkan pada orang atau

kelompok itu bukan anggota kelompoknya. Prasangka bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif dan terbentuk secara sosial dalam waktu yang lama (Sarwono, 2007). Prasangka mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Pembaca yang memiliki prasangka, penerimaannya atas informasi yang dibaca di media massa akan dipengaruhi oleh prasangkanya terhadap informasi, penyampai informasi, atau sumber informasi tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerimaan pembaca atas informasi yang disampaikan oleh media massa dalam teks berita dipengaruhi oleh prasangkanya terhadap informasi, penyampai informasi, atau sumber informasi tersebut. Dengan kata lain, parasangka yang mereka bawa ketika menghadapi teks berita, menentukan penerimaan mereka atas informasi yang mereka baca. Pembaca yang berprasangka positif cenderung akan menerima informasi dalam teks berita secara positif pula. Sebaliknya, pembaca yang berprasangka negatif cenderung akan menerima informasi dari teks berita secara negatif pula (Bonnita, 2004; Adona, 2006; dan Darman, 2005).

#### ***Penerimaan yang Dilandasi Sikap Netral***

Dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, terdapat dua pandangan yang saling bertentangan, yaitu (a) semburan lumpur terjadi karena kesalahan proses pengeboran, dan (b) semburan lumpur terjadi karena peristiwa alam atau pengaruh gempa Yogyakarta. Pandangan yang tidak memihak kepada salah satu pandangan tersebut dikatakan bersifat netral. Pembaca yang bersikap netral membaca dan menerima informasi tentang kasus semburan lumpur secara kritis. Munculnya sikap kritis tersebut disebabkan pembaca tidak berprasangka terhadap informasi, penyampai informasi dan sumber informasi dalam teks berita. Hal itu membuat informasi yang diterima dari teks berita dipertimbangkan

secara kritis akurasi, keselarasannya, dan kebenarannya. Pembaca cenderung akan menggunakan berbagai pertimbangan dalam memahami dan menerima informasi tersebut (periksa Severin dan Tankard, 2001).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan ditemukan maujud (*entity*) kekerasan simbolik dalam teks berita yang berupa (a) makna kabur, (b) logika bias, dan (c) nilai bias. Makna kabur, logika bias, dan nilai bias merupakan wujud ***informasi bias yang dipaksakan oleh media massa kepada pembaca***. Strategi kekerasan simbolik yang ditemukan penelitian ini meliputi (a) penghalusan informasi, (b) pelogisan informasi, dan (c) pemositifan informasi. Penghalusan, pelogisan, dan pemositifan informasi tersebut merupakan ***upaya penyembunyian informasi bias dalam teks berita***. Dampak kekerasan simbolik terhadap pembaca tampak pada penerimaan pembaca atas informasi yang disampaikan oleh media massa. Penerimaan pembaca tersebut meliputi (a) penerimaan yang dilandasi pandangan dan sikap berprasangka, dan (b) penerimaan yang dilandasi pandangan dan sikap netral. Dengan demikian, ***kekerasan simbolik tidak/belum tampak berdampak nyata pada pembaca ideal pada penerimaan mereka dalam waktu pendek***.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan (a) wartawan dan pengelola media massa menjaga agar informasi yang disampaikan kepada khalayak tetap objektif, benar, menyeluruh, dan berimbang; (b) pembaca media koran perlu selalu mengasah daya kritisnya dan bersikap kritis dalam membaca teks berita; (c) Dewan Pers diharapkan melaksanakan Undang-Undang Pers secara lebih tegas dan sungguh-

sebenarnya; (d) guru dan penulis bahan ajar hendaknya selalu berpikir dan bersikap kritis agar dapat menghindarkan pembelajaran yang dilakukan dan bahan ajar yang ditulis dari kekerasan simbolik, serta memasukkan wacana kritis sebagai bahan perkuliahan di perguruan tinggi; (e) peneliti berikutnya dapat meneliti kekerasan simbolik di media massa elektronik, buku ajar, praktik pembelajaran, buku bacaan dengan menggunakan ancangan teori yang sama atau berbeda.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Terjemahan Gino Raymond dan Matthew Adamson. 1994. Cambridge: Harvar University Press.
- Bonnita, Anastasia. 2004. *Prasangka Gender dalam Kaitannya dengan Sikap terhadap Manajer Wanita*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Cahyarini, Dyah Ratri Savitri. 2005. *Prasangka Masyarakat terhadap SPG (Sales Promotion Girl)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Cummings, Loise. 2005. *Pragmatics: a Multidisciplinary Perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Dhakidae, Daniel. 1996. Bahasa dan kekuasaan: Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru. Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (hlm. 246—251). Bandung: Mizan.
- Darman, Westy. 2005. *Gambaran Prasangka pada Suku Amungme terhadap Pendatang di Tembagapura*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Eriyanto, 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Eriyanto, 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fashri, Fauzi. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Refleksi Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Foucault, Michel. 1971. *Kritik Wacana Bahasa*. Terjemahan Inyik Ridwan Muzir. 2003. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makarim, Edmon. 2002. *Krisis Media dalam Perspektif Konvergensi Telematika: Wacana Media untuk Penyempurnaan UU Pers*, (Online), (<http://www.duniaesai.com/antro/antro2.htm>, diakses tanggal 07-03-2007).
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. *Hiper-Realitas Media dan Kebudayaan: Kebenaran dalam Kegagalan Informasi*, (Online), (<http://www.forum-rektor.org/artikel.php?hal=4&no=10>, diakses tanggal 07-02-2007).
- Pratt, Mary Laouise. 1981. *Literary Implication and Implicature*. Dalam Donald C Freeman (Ed.) *Essays in Modern Stilistics*. New York: Methuen and Co.
- Pratt, Mary Laouise. 1977. *Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse*. Blomington: Indiana University Press.
- Rani, Abdul. 2006. *Penggunaan Bahasa dalam Wacana Iklan Televisi*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS Universitas Negeri Malang.
- Roekhan. 1992. *Penggunaan Maksim Tutar dalam "Kooong" Karya Iwan Simatupang*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP Malang.
- Roekhan. 2007. *Pertarungan Simbolik dalam Wacana Penolakan Pembangunan Bandara oleh Warga Sukajati, Jawa*

- Barat. *Bahasa dan Sastra Indonesia*, X(2):95—112.
- Rusdiarti, Suma Riella. 2003. Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan. *Basis* VII(11—12):31—40.
- Severin, Werner J dan James W. Tankard. 2001. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapannya di dalam Media Massa*. Terjemahan Sugeng Hariyanto. 2005. Jakarta: Prenada Media.
- Toulmin, S.E. 1990. *The Use of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.